

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

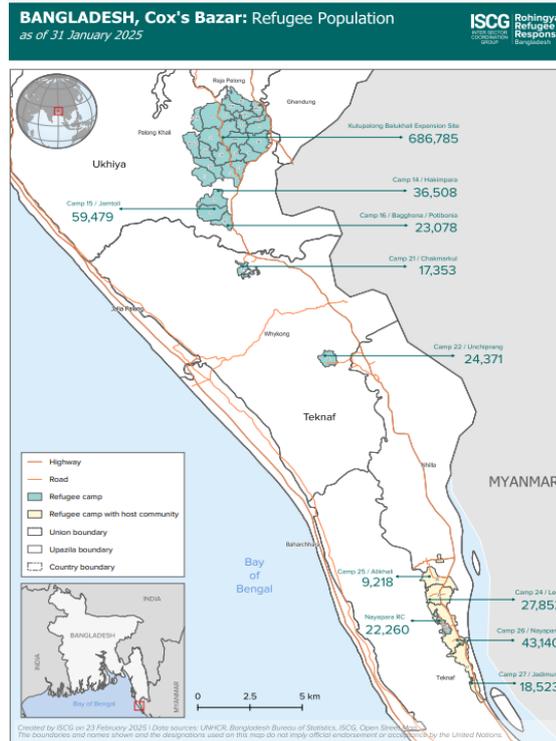
Kelompok etnis Rohingya telah menghadapi diskriminasi di Myanmar selama beberapa dekade. Sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, Pemerintah Myanmar menolak untuk mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu bagian dari 135 kelompok etnis resmi negara Myanmar tersebut. Puncak dari pengabaian ini tertuang dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 atau Burma Citizenship Law, yang mencabut status kewarganegaraan Rohingya dan mengklasifikasikan mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh (Human Rights Watch, 2020). Kebijakan tersebut merupakan bentuk dari adanya apartheid hukum (Human Rights Watch, 2020). Kekerasan semakin intensif pasca kekerasan antarkelompok di Negara Bagian Rakhine pada Agustus 2017, yang memicu pengungsi yang berjumlah sekitar 700.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh (Human Rights Watch, 2020). Dilansir melalui portal berita internasional aljazeera, komisioner tinggi hak asasi manusia dari PBB ketika berpidato di Jenewa menyatakan bahwa kondisi kejam ini merupakan contoh nyata dari adanya pembersihan etnis (ALJAZEERA, 2017).

Negara Tujuan	Jumlah Pengungsi Rohingya
Bangladesh	1.000.000
Pakistan	350.000
Saudi Arabia	200.000
Malaysia	150.000

Tabel 1 Peringkat Negara Tujuan Pengungsi Rohingya

Sumber: (ALJAZEERA, 2017)

Sebagian besar dari para pengungsi Rohingya memilih Bangladesh sebagai tempat tujuan mereka karena letak geografis yang berdekatan. Pemerintah Bangladesh melalui Perdana Menteri Sheikh Hasina menyatakan keputusan resmi bahwa Bangladesh memberikan tempat tinggal sementara untuk pengungsi Rohingya yang menderita atas pertimbangan kemanusiaan meskipun menghadapi banyak tantangan dan kendala, terutama pada saat pengungsi terlantar dan tidak diterima oleh banyak negara (Ministry of Foreign Affairs Bangladesh, 2017). Hal tersebut membuat gelombang pengungsi Rohingya semakin tinggi untuk mengungsi di Bangladesh. Pada tahun 2023 pengungsi Rohingya di Bangladesh mencapai hampir 1 juta nyawa. Masyarakat yang tinggal di kamp pengungsian Bangladesh sangat rentan akan bahaya terkait cuaca terutama pada tahun 2023, seperti Siklon Mocha dan kejadian kebakaran di kamp pengungsian, insiden semacam tersebut menjadi masukan bagi kesiapsiagaan sekaligus mengingatkan pentingnya meningkatkan keamanan karena semakin maraknya kekerasan kelompok terorganisir meskipun sudah ada upaya dari lembaga penegak hukum Bangladesh (Rohingya Refugees Response Bangladesh, 2024).



Gambar 1. 1 Peta Persebaran Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Sumber: (Inter Sector Coordination Group, 2025)

Pada peta persebaran tersebut menunjukkan bahwa hingga 2024 persebaran penduduk Rohingya selalu meningkat tiap waktunya menuju ke Bangladesh, sedangkan gelombang pengungsi yang tinggi dan faktor iklim yang terjadi di Bangladesh membuat Bangladesh membutuhkan bantuan internasional untuk menanggapi hal tersebut. Banyak negara lain yang memberi respon berupa bantuan kepada pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh seperti Amerika Serikat hingga Australia yang memberi bantuan berupa dana hingga bantuan kemanusiaan berupa sumber daya untuk barang dan perlengkapan untuk kelangsungan hidup.

Negara Pendonor	Jumlah Pendanaan
Amerika Serikat	214.8 M
European Comunity	45.6 M
Australia	45.2 M
United Kingdom	37.2 M

Tabel 2 Negara Pendonor untuk Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Sumber: (Inter Sector Coordination Group, 2024)

Australia menjadi salah satu negara dengan jumlah pemberian bantuan tertinggi setelah Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi menarik mengingat kebijakan Australia mengenai migrasi yang cukup ketat. Menurut statistik dari dokumen resmi Department of Foreign Affairs and Trade of Australia jumlah bantuan dari negara ini mengalami peningkatan sejak tahun 2022. Pemerintah Australia pada Forum Pengungsi Global 2023 yang diadakan di Jenewa menyatakan secara spesifik bahwa dari tahun 2023 hingga 2025, pemerintah Australia berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan senilai \$235 juta untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya di Bangladesh dan komunitas tuan rumah mereka, serta untuk kebutuhan kemanusiaan yang lebih luas di Myanmar, termasuk membantu Rohingya di negara bagian Rakhine. Mereka yang paling membutuhkan, termasuk perempuan, anak perempuan, dan penyandang disabilitas, akan menerima perlindungan, makanan, air, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan dari dana Australia. Jumlah total anggaran bantuan yang

diberikan oleh Australia kepada Bangladesh tersebut meningkat sangat tinggi dari total anggaran sebelumnya pada tahun 2022 hingga 2023 yang berjumlah \$147,7.

Australia giat memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh seperti pada tahun 2023. Pada 17 Mei 2023 Australia memberikan bantuan berupa dana sebesar 5.358.339 dolar Australia yang disalurkan melalui organisasi United Nation Population Fund di sektor *Water Sanitation Hygiene* yang disalurkan ke sektor *Nutrition – Integrated malnutrition prevention and treatment programme for refugees and local Bangladeshi Communities in Cox's Bazar*. Selain itu, terdapat bantuan dari Australia yang disalurkan kepada Bangladesh melalui organisasi Australian Red Cross dengan tujuan bantuan sebagai respon terhadap adanya siklon mocha yang berada di Cox's Bazar Bangladesh pada tahun 2023 yang tercatat melakukan bantuan finansial pada sektor tersebut tiga kali berdasarkan data dari Financial Tracking Services Australia. Pada tahun 2024, Australia juga memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai bagian dari Australian Humanitarian Partnership Rohingya Response (Bangladesh) yang disalurkan sebedar AU\$10.589.014.

Australia memiliki rekam jejak dalam memberikan bantuan luar negerinya, termasuk dalam program program yang mendukung penanganan pengungsi. Australia merupakan salah satu negara dengan pemberi bantuan luar negeri terbesar, terutama di Kawasan Pasifik. Rekam jejak Australia dalam pemberian bantuan luar negeri sangat menarik, dalam pemberian bantuan luar negeri Australia menempati posisi ke-13 sebagai negara kontributor terbesar anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dikenal juga sebagai negara yang secara konsisten

membayar iuran secara penuh (Department of Foreign Affairs and Trade, n.d.). Penyaluran bantuan luar negeri Australia salah satunya disalurkan oleh lembaga utamanya yaitu *Australia Agency for International Development* (AusAID), yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan program program bantuan tersebut. Terdapat juga *Australia Assists*, yang merupakan program kemanusiaan yang memungkinkan tenaga ahli dari Australia yang membantu dalam situasi darurat dan krisis kemanusiaan di berbagai negara. Organisasi internasional seperti PBB hingga lembaga swadaya masyarakat global juga menjadi salah satu cara dari Australia dalam menyalurkan bantuan internasionalnya.

Australia dapat dikatakan sebagai negara yang dermawan dalam memberikan bantuan luar negeri terutama kepada negara di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut tercermin melalui tiga hal yang difokuskan dalam kebijakan bantuan luar negeri Australia yaitu membangun kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana sebelum terjadi dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk mengurangi dampaknya, menanggapi krisis dan bencana dengan memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan melindungi secara langsung dan jangka panjang, memperkuat sistem kemanusiaan internasional dan mengambil langkah untuk memperkuat kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional (Foreign Minister Government Australia, 2024). Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong mengatakan bahwa Australia mendukung mereka yang membutuhkan selama konflik dan krisis, tidak hanya menyelamatkan nyawa dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan tetapi juga tentang perdamaian, stabilitas, dan

kemakmuran yang diinginkan Australia, kawasannya, dan dunia (Foreign Minister Government Australia, 2024).

Dalam melakukan suatu bantuan luar negeri sebuah negara tentu memiliki motif tersendiri dibalik kebijakan tersebut. Maka dari itu penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui motif apa dibalik bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Australia kepada pengungsi rohingya yang berada di pengungsian Bangladesh. Penelitian ini dilakukan karena masih belum ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai motif dibalik bantuan Australia kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh yang spesifiknya pada tahun 2023-2024. Sebagian terbesar dari penelitian terdahulu membahas mengenai sekuritisasi, dilema, hingga kontradiksi konvensi 1951 dengan *operation sovereign borders* Australia.

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan literasi terhadap beberapa jurnal sebagai bahan acuan atau tinjauan literatur dengan tujuan untuk memperkaya dan memperdalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini. Jurnal kualitatif deskriptif yang ditulis oleh Ilham Agustian Candra dan Arie Kusuma Paksi dengan judul “Motivasi Australia memberikan Bantuan Luar Negeri kepada Indonesia dalam Menangani Penyebaran COVID-19 Tahun 2020-2021” (Candra, 2021) menjadi tinjauan literatur oleh penulis. Pada penelitian tersebut membahas spesifikasi penelitian mengenai latar belakang pemberian bantuan dari Australia kepada Indonesia pada tahun 2020-2021 mengenai COVID-19 yang ditelaah menggunakan konsep kepentingan nasional. Pada penulisan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kerja sama antar negara dalam bentuk bantuan luar

negeri menjadi solusi untuk mengatasi dampak COVID-19. Australia membantu Indonesia melalui tiga pilar utama yaitu keamanan kesehatan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi. Bantuan ini berkontribusi pada pengelolaan pandemi dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selain kepentingan kemanusiaan, Australia juga memperkuat sektor kesehatan dan swasta. Bantuan luar negeri tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas internasional dan mempererat hubungan bilateral. Terdapat perbedaan dari penelitian yang digunakan sebagai tinjauan literatur oleh penulis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini. Perbedaan tersebut terletak pada negara penerima bantuan, konteks pemberian bantuan, dan konsep yang digunakan sebagai analisa penelitian. Pada penulisan ini, penulis menggunakan para pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai penerima bantuan dan konteks tujuan bantuannya dengan konsep penelitian kebijakan luar negeri yang digunakan untuk menganalisa.

Penulis juga melakukan tinjauan literatur lainnya, Kedua, penulis melakukan tinjauan terhadap penulisan terdahulu dari Dzakira Pesona Sadewa dengan judul penulisan “Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh” (Sadewa, 2019). Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini dianalisa menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari Rosenau dan *human security*. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan adanya bantuan luar negeri dari Indonesia kepada para pengungsi Rohingya di Bangladesh menunjukkan bahwa adanya manfaat untuk

mempererat kerjasama dari kedua negara dan memperkecil jumlah korban dari etnis Rohingya yang mengalami penderitaan berlanjut di Bangladesh. Pada penulisan tersebut terdapat perbedaan dengan penulisan ini. Perbedaan tersebut terletak pada subjek negara yang digunakan. Pada penulisan ini menggunakan Australia sebagai subjek sedangkan pada penulisan terdahulu tersebut subjek yang digunakan adalah negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya oleh penulis dapat dirumuskan permasalahan mengenai “Mengapa Australia memberikan bantuan luar negeri terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh pada 2017-2024 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan sebagai bentuk pemenuhan dari mata kuliah skripsi dan menjadi syarat dalam mendapatkan gelar strata satu jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi informasi tambahan bagi pembaca.

1.3.2 Secara Khusus

Melalui penjelasan dan rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui motif dari bantuan luar negeri Australia terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh pada tahun 2023-2024.

1.4 Kerangka pemikiran

1.4.1 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri secara umum dipahami sebagai pemberian sumber daya dari satu negara ke negara lain, baik dalam bentuk barang maupun dana. Menurut Lancaster, bantuan luar negeri adalah perpindahan sumber daya secara sukarela antara negara, baik melalui lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Sumber daya tersebut mencakup dukungan ekonomi, militer, teknis, dan keuangan dalam skala bilateral maupun multilateral (Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics.*, 2007). Lancaster mengelompokkan tujuan bantuan internasional ke dalam empat kategori utama yaitu diplomatik, pembangunan, kemanusiaan, dan komersial (Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics.*, 2007). Dalam praktiknya, sebagian besar bantuan luar negeri diberikan secara bilateral, langsung dari satu negara ke negara lain. Namun, donor juga dapat menyalurkan bantuan melalui mekanisme multilateral yang melibatkan berbagai negara. Bantuan bilateral umumnya memiliki keterkaitan politik lebih kuat dibandingkan bantuan multilateral karena lebih dipengaruhi oleh kondisi politik domestik negara donor atau negara pemberi bantuan. Selain itu, bantuan luar negeri juga sering kali menjadi alat diplomasi yang digunakan oleh negara donor untuk memperkuat pengaruhnya di tingkat global, menjalin hubungan strategis, serta menjaga kepentingan nasionalnya di negara penerima (Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics.*, 2007).

Motif merupakan aspek penting dalam pemberian bantuan luar negeri, karena mencerminkan tujuan donor dalam menyalurkan bantuannya. Dengan demikian, motif bantuan luar negeri adalah dorongan yang membuat negara donor

memberikan bantuan, sekaligus mencerminkan kepentingannya terhadap negara penerima. Motif-motif ini tidak selalu berdiri sendiri, melainkan sering saling berkaitan satu sama lain dalam kebijakan luar negeri, di mana suatu bantuan bisa memiliki lebih dari satu motif yang melatarbelakanginya. Dalam banyak kasus, bantuan luar negeri digunakan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat hubungan bilateral dan mengamankan kepentingan geopolitik.

John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen mengidentifikasi beberapa motif yang melandasi pemberian bantuan luar negeri (Pedersen, 2003):

1. Motif Kemanusiaan dan Moral

Motif ini didasarkan pada tanggung jawab moral untuk membantu negara miskin. Bantuan luar negeri sering dianggap sebagai bentuk amal dan memastikan bahwa negara miskin juga dapat mengakses sumber daya yang mereka butuhkan. Bantuan ini dapat berupa bantuan pangan, kesehatan, pendidikan. Bantuan multilateral cenderung lebih murni dan berlandaskan prinsip moral, sedangkan bantuan bilateral sering dikaitkan dengan kepentingan keamanan nasional dan ekonomi donor. Dalam beberapa kasus, bantuan kemanusiaan diberikan dalam situasi darurat seperti bencana alam atau konflik bersenjata yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Pemberian bantuan ini tidak hanya berfokus pada aspek jangka pendek tetapi juga berusaha menciptakan ketahanan dan ketangguhan bagi negara penerima untuk menghadapi krisis serupa di masa depan (Pedersen, 2003).

2. Motif Politik dan Keamanan

Bantuan luar negeri sering dijadikan instrumen untuk mencapai keamanan nasional dan kepentingan politik donor. Dalam hal ini, bantuan militer sering kali

dikaitkan dengan pembentukan aliansi strategis, terutama di kawasan yang dianggap memiliki kepentingan geopolitik bagi negara donor. Bantuan luar negeri juga digunakan untuk memengaruhi kebijakan negara penerima agar sejalan dengan kepentingan negara donor. Namun, bantuan pembangunan umumnya memiliki kaitan yang lebih lemah dengan kepentingan politik dan keamanan donor, meskipun tetap ada unsur diplomasi yang berperan dalam pemberiannya. Selain itu, dalam beberapa situasi, bantuan politik digunakan untuk menjaga stabilitas di suatu wilayah dengan mendukung pemerintahan yang sejalan dengan kebijakan negara donor (Pedersen, 2003).

3. Motif Ekonomi

Banyak negara maju memberikan bantuan luar negeri berdasarkan kepentingan ekonomi. Motif ini mempengaruhi cara donor memilih negara penerima serta metode pemberian bantuannya. Negara bekas jajahan sering menerima bantuan lebih besar, bukan hanya karena hubungan historis tetapi juga untuk memastikan akses ekonomi yang berkelanjutan. Bantuan yang bersyarat (*tied aid*) biasanya mengharuskan penerima menggunakan dana tersebut untuk membeli barang atau jasa dari negara donor. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi dan membuka peluang bagi negara donor untuk memperluas pasar ekspornya serta meningkatkan investasi di negara penerima bantuan. Di samping itu, bantuan ekonomi sering kali diberikan dengan harapan bahwa negara penerima akan menjadi mitra dagang yang lebih stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang (Pedersen, 2003).

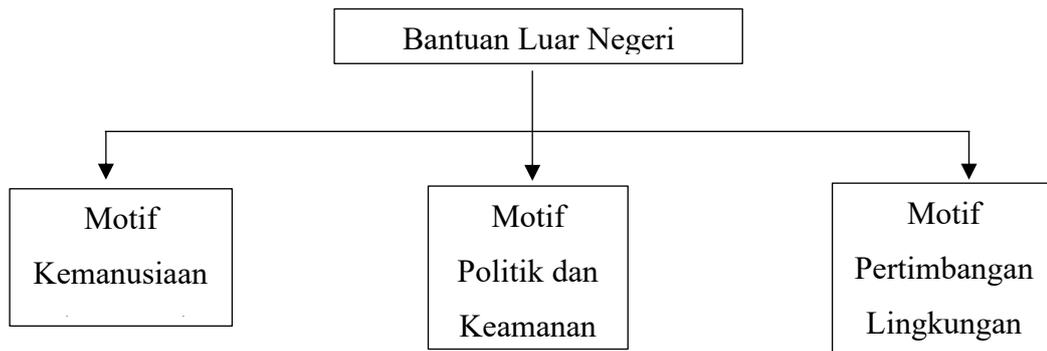
4. Motif Pertimbangan Lingkungan

Kemiskinan di negara berkembang sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, baik secara lokal maupun global. Peningkatan populasi dan eksploitasi sumber daya menjadi tantangan dalam mengatasi kemiskinan. Maka dari itu, banyak negara maju memberikan bantuan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Bantuan ini dapat berupa transfer teknologi ramah lingkungan, dukungan untuk program konservasi, serta bantuan keuangan untuk proyek-proyek energi terbarukan. Bantuan ini mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Dengan semakin meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, bantuan luar negeri yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim menjadi semakin signifikan dalam kerja sama internasional (Pedersen, 2003).

Dalam jangka panjang, bantuan luar negeri diharapkan tidak hanya menjadi alat bantu sementara, tetapi juga mampu membangun kapasitas negara penerima agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, efektivitas bantuan luar negeri perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan tujuan awal dan benar-benar memberikan dampak positif bagi negara penerima. Selain itu, adanya transparansi dalam pemberian bantuan juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Negara penerima juga diharapkan dapat mengelola bantuan dengan baik sehingga mampu memanfaatkan

sumber daya yang diberikan untuk mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan.

1.5 Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Berdasarkan paparan dari latar belakang hingga pada bagian kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terbentuklah sintesa pemikiran sebagai berikut yang dirancang oleh penulis. Bantuan luar negeri diberikan oleh negara pendonor kepada negara tujuan. Dalam melakukan bantuan luar negeri terdapat suatu motif dibaliknya seperti kemanusiaan dan moral, politik, dan pertimbangan lingkungan.

1.6 Argumen Penulis

Bantuan luar negeri Australia kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh pada 2017–2024 didorong oleh tiga dari empat motif utama yang saling terkait. Pertama, motif kemanusiaan menjadi landasan moral, dengan komitmen Australia untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, seperti pangan, kesehatan, dan perlindungan anak, melalui kerja sama dengan beberapa organisasi internasional. Kedua, motif politik tercermin dari upaya memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik, di mana krisis Rohingya berpotensi memicu ketidakamanan regional.

Ketiga, pertimbangan lingkungan menjadi inovasi melalui pendanaan proyek adaptasi iklim di kamp pengungsi yang sekaligus mengurangi risiko bencana di kawasan strategis Teluk Benggala yang juga merupakan tempat pengungsi berada. Kombinasi ketiga motif ini menunjukkan pendekatan Australia yang memadukan nilai-nilai kemanusiaan dengan kepentingan nasional, sekaligus merespons tantangan global.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian kualitatif merupakan proses yang bertujuan untuk memahami kompleksitas interaksi manusia (Sarwono, 2006). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil akhir (Sarwono, 2006). Secara umum, penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis maupun pernyataan lisan dari subjek penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memaparkan fenomena yang terjadi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian dengan metode eksplanatif ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan “mengapa (*why*)” (Sarwono, 2006).

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dibutuhkan adanya jangkauan tertentu untuk dapat memfokuskan pembahasan fenomena yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah bantuan yang diberikan pada tahun 2017 hingga 2024, maka dari itu penulis menerapkan jangkauan penelitian dari sejak pertama kali Australia memberikan bantuan luar negeri kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh yaitu pada tahun 2017.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis pada penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan bentuk studi literatur. Artinya, dalam mengumpulkan data, dan mencari sumber data, penulis tidak berkenaan langsung dengan pihak yang bersangkutan, melainkan melalui perantara media. Data-data yang diperoleh penulis berasal dari literatur-literatur seperti media berita online yang kredibel, *website*, karya tulis ilmiah, dan buku yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Setelah data yang diperlukan melalui studi literatur tersebut terkumpul, kemudian penulis akan menganalisis dan mengkaji lebih dalam referensi dari sumber-sumber yang diperoleh. Hal tersebut agar penulis dapat memberikan analisis yang komprehensif terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

1.7.4 Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Mengacu pada teknik analisis data kualitatif yang dijelaskan oleh Sugiyono, teknik analisis data kualitatif adalah suatu teknik analisis yang bersifat induktif (Sugiyono, 2013). Data yang sudah dihimpun, akan dirancang secara terstruktur dan di tarik hasil akhir kesimpulannya. Kesimpulan tersebut menjadi hasil dari data yang telah diolah untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih data yang perlu dipelajari (Sugiyono, 2013). Analisis data kualitatif lebih berfokus pada fenomena khusus, negara, wilayah, organisasi tertentu, serta individu. Pada penelitian ini, sumber data kualitatif yang digunakan peneliti merupakan studi literatur. Maka dari

itu, data empiris yang digunakan adalah data yang berbentuk penjelasan kata verbal sehingga tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Bab I berisikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metode penelitian yang berisi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan mengenai analisis motif politik dan keamanan pada bantuan luar negeri Australia kepada pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh pada tahun 2017-2024.

Bab III berisikan mengenai analisis motif lingkungan, motif moral dan kemanusiaan pada bantuan luar negeri Australia kepada pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh pada tahun 2017-2024.

Bab IV, yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari keseluruhan penelitian yang telah disusun oleh peneliti.